



Judul : Kasus suap pegawai pajak, Komisi III desak diusut tuntas
Tanggal : Kamis, 15 Januari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Kasus Suap Pegawai Pajak Komisi III Desak Diusut Tuntas

SENAYAN mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas kasus dugaan suap pengurangan nilai pajak yang melibatkan pegawai pajak. Kasus ini dinilai kembali membuka persoalan serius terkait pengawasan dan integritas aparatur perpajakan.

Anggota Komisi III DPR Abdullah menegaskan, pengungkapan kasus tersebut harus menjadi momentum bersih-bersih di lingkungan pajak. Dugaan suap yang melibatkan aparatur negara sangat menyakitkan dan merugikan masyarakat luas. "Pajak adalah tulang punggung keuangan negara, tetapi justru diselewengkan oleh oknum yang seharusnya menjadi garda terdepan penerimaan negara," ujarnya.

Ia menilai, praktik korupsi di sektor pajak tidak dapat lagi ditoleransi, terlebih pegawai pajak selama ini telah menerima fasilitas dan penghasilan yang relatif besar. Namun, hal tersebut terbukti tidak menjamin bersihnya perilaku dari penyimpangan. "Fakta bahwa kasus seperti ini masih terjadi menunjukkan lemahnya integritas dan pengawasan internal," ucapnya.

Karena itu, Abdullah mendukung KPK mengusut kasus ini hingga ke akar, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain dan jaringan korupsi yang lebih luas di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. "Penegakan hukum harus tegas, transparan,

dan tanpa pandang bulu. Kepercayaan publik hanya bisa pulih jika negara benar-benar serius memberantas korupsi," tegasnya.

Senada, anggota Komisi III DPR Rudianto Lalo menilai, besarnya penghasilan pegawai pajak tidak menjamin terhindar dari korupsi. Kunci utama terletak pada integritas pribadi, bukan semata soal gaji. "Gaji itu belum tentu jaminan. Godaan selalu ada, sementara integritas yang menentukan," tandasnya.

Rudianto mengingatkan, manipulasi pajak berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi negara jika tidak ditindak tegas. Ia mencontohkan dampak fatal dari pengurangan nilai pajak yang seharusnya dibayarkan wajib pajak. "Bayangkan kalau seharusnya ratusan miliar, tapi nilainya dihilangkan nolnya," katanya.

Ia pun mendesak aparat penegak hukum menjatuhkan hukuman seberat-beratnya agar menimbulkan efek jera dan mencegah terulangnya kasus serupa.

Anggota Komisi XI DPR Amin Ak menambahkan, kasus ini sebagai alarm keras pentingnya menjaga integritas aparat perpajakan, terlebih di tengah tekanan APBN dan defisit anggaran. Meski demikian, kasus ini merupakan penindakan terhadap oknum, bukan cerminan keseluruhan institusi perpajakan. "Ini bukan gambaran institusi pajak secara menyeluruh yang saat ini tengah menjalankan reformasi intensif," ujar Amin. ■ PYB